

LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT SERTA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT

¹Sari Kurniah Simamora , ²Wahyuni Pandiagan, ³Ilham Satriawan , ⁴
M. Irham Maskuri Sitompul⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : ¹sksimamora29@gmail.com , ²wahyunipandiagan@gmail.com
³ilhamsatriawan30@gmail.com , ⁴irhammaskurisitompul@gmail.com

Abstrak: Lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang berguna untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut. lembaga pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Untuk mencapai lembaga pendidikan masyarakat yang berkualitas dibutuhkan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat untuk mendukung jalannya lembaga pendidikan tersebut. Pemerintah pusat maupun daerah merupakan perwujudan masyarakat bangsa dan Negara. Pemerintah mengemban kepercayaan masyarakat untuk mengelola keseluruhan segi kehidupan bangsa (dalam bidang pendidikan). Adapun tanggung jawab ini meliputi: 1. Tanggung jawab kenegaraan dan kemasyarakatan yang wujudnya berupa motivasi untuk melestarikan tegaknya kemerdekaan bangsa dan Negara. Tanggungjawab ini mencakup pembinaan kesadaran nasional, berideologi nasional dan berkonstitusi, 2. Tanggung jawab structural kelembagaan yakni sebagai wujud tata kelembagaan Negara dengan masing-masing aspek tanggungjawabnya. Dapat juga diartikan sebagai tanggungjawab yuridis-konstitusional.

Keyword : Lembaga Pendidikan Masyarakat , Tanggungjawab Pemerintah

Abstract: Educational institutions are a useful forum for fostering human beings, leading to a better future. Everyone who is in the container will experience changes and developments according to the color and style of the institution. In educational institutions, society is the third environment after family and school. Communities are defined as people who are in an area, experience the same experiences, have a lot of compatibility and awareness of their unity, and can act together to meet life crises. To achieve quality educational institutions needed by quality communities to support these educational institutions the. The central and regional governments are the embodiment of the nation's community and state. The government carries the trust of the people to manage the entire life of the nation (in the field of education). These responsibilities include: 1. State and social responsibilities in the form of independence of the nation and state. This responsibility includes fostering national awareness, having a national ideology and being constitutional. It can also be interpreted as a legal-constitutional obligation.

Keywords: Community Education Institutions, Government Responsibilities

PENDAHULUAN

Manusia ketika dilahirkan berada dalam keadaan nyaris tidak berdaya, tanpa bantuan dan pertolongan orang lain, terutama orang tuanya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di balik keadaannya yang lemah itu, ia memiliki potensi baik yang bersifat jasmani maupun rohani sebagai makhluk yang dapat di didik. Potensi ini secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang dari dalam diri anak. Untuk mewujudkan perkembangan potensi anak tersebut maka diperlukan pertolongan, dan tuntunan dari luar. Jika unsur pertolongan tidak ada, maka potensi tersebut tetap tinggal potensi belaka yang tak sempat diaktualisasikan.

Dengan demikian dalam konteks pencerdasan anak bangsa, maka lembaga pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat) memiliki peranan yang sangat strategis yang akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sebagai makhluk individu, sosial, susila dan religius.

Dengan memperhatikan bahwa anak adalah individu yang berkembang, ia membutuhkan pertolongan dari orang yang telah dewasa, anak harus dapat berkembang secara bebas, tetapi terarah. Pendidikan harus dapat memberikan motivasi dalam mengaktifkan anak. Anak adalah pemilik hak yang wajib dihormati oleh pemangku kewajiban, yaitu orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya, serta institusi masyarakat bangsa dan negara. Hak anak dapat terpenuhi manakala ketiga lembaga pendidikan tersebut bersinergi dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Tidak justru saling lempar tanggung jawab bahkan terkesan saling menyalahkan. Orang tua menyalahkan sekolah, sekolah menyalahkan orang tua dan lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan cara pandang yang sama dari ketiga lembaga pendidikan tersebut, dengan memandang anak sebagai generasi penerus yang akan menerima warisan nilai dan budaya dari generasi sebelumnya, dan selanjutnya akan mengembangkan warisan tersebut menjadi lebih berdayaguna dan berhasilguna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Meta – Analisis, yaitu metode penelitian yang menganalisis hasil dari berbagai studi yang menggabungkan hasil dari beberapa macam studi ilmiah. Peneliti mengamati beberapa jurnal, buku dan website lembaga pendidikan masyarakat serta tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat lalu menggabungkannya dan menjadikannya sebuah jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Pendidikan Masyarakat

Lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang berguna untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut. Dimana lembaga pendidikan tersebut (keluarga, sekolah dan masyarakat) K.H. Dewantara menyebut “tri pusat pendidikan” Sementara Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutnya dengan jalur pendidikan informal, formal dan non formal. Dalam sistem pendidikan nasional, masing-masing lembaga tersebut, mempunyai kaitan tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan- pendidikan nasional.

Dalam konteks lembaga pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Masyarakat sebagai lingkungan/lembaga pendidikan ketiga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana prasarana dan menyediakan lapangan kerja. Sebagaimana Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pada pasal 9 berbunyi “ Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan” . Karenanya , partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sangat diharapkan . Selanjutnya pendidikan dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Diselenggarakan dengan sengaja diluar sekolah
- b. Peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah ataupun drop out
- c. Tidak mengenal jenjang dan porogram pendidikan untuk jangka pendek
- d. Peserta tidak perlu homogen
- e. Ada waktu belajar dan metode formal , serta evaluasi yang sistematis
- f. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus
- g. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan dalam meningkatkan taraf hidup.

Selanjutnya ada beberapa istilah yang diberikan kepada lembaga pendidikan masyarakat sebagai jalur pendidikan luar sekolah yaitu :

- a. Pendidikan sosial , yaitu program yang diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat untuk mendidik individu dan lingkungan sosial , supaya bebas dan bertanggung jawab .

- b. Pendidikan masyarakat , merupakan pendidikan yang ditunjukkan kepada orang dewasa , termasuk pemuda diluar batas umur tertinggi , kewajiban belajar dilakukan diluar lingkungan dan sistem persekolahan resmi .
- c. Pendidikan rakyat adalah tindakan-tindakan atau pengaruh yang terkadang mengenai seluruh masyarakat .
- d. Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang dilakukan diluar sistem persekolahan biasa .
- e. Mass Education adalah pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa diluar lingkungan sekolah .
- f. Adult Education adalah pendidikan untuk orang dewasa yang mengambil umur batas tertinggi dari masa kewajiban belajar.
- g. Extension Education adalah suatu bentuk dari adult education, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah biasa, yang khusus dikelola oleh Perguruan Tinggi untuk menyahuti hasrat masyarakat yang ingin masuk dunia Universitas , misalnya Universitas Terbuka.
- h. Fundamental Education ialah pendidikan yang bertujuan membantu masyarakat untuk mencapai kemajuan sosial , ekonomi, agar mereka dapat menempati posisi yang layak.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sangat diharapkan serta masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan dan aktualisasi diri setiap individu.

Tujuan Lembaga Pendidikan

Tujuan Dan Tugas Lembaga Pendidikan Pada dasarnya pembentukan lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi pada peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka lembaga ini memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar kepada peserta didik, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungannya.
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
- c. Memberikan bimbingan konseling kepada para peserta didik.

- d. Membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua serta masyarakat

Peran Masyarakat Terhadap Pendidikan

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok secara bersama sama. Oleh karena itu dimensi sosial menyatu kepada kepentingan sebagai makhluk sosial, yang didasari pada pemahaman bahwa manusia hidup bermasyarakat. Pendidikan dalam konteks ini adalah usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar mereka dapat berperan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Pendidikan dan masyarakat saling berkaitan, untuk mengembangkan pendidikan diperlukan partisipasi dari masyarakat, untuk selalu peduli akan berpengaruh pendidikan terhadap kehidupan masyarakat, masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan.

Masyarakat yang merupakan lembaga ketiga sebagai pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali perannya. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada sebagai salah satunya lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktifitas yang menyangkut masalah pendidikan.

Diantara peranan masyarakat dalam menunjang pendidikan ialah:

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah
2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita cita dan kebutuhan masyarakat.
3. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung gedung museum, perpustakaan, panggung panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya.
4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah yaitunya orang orang yang punya keahlian khusus di masyarakat, seperti: petani, peternak, dokter, saudagar, polisi, dan sebagainya.
5. Masyarakatlah sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 BAB III pasal 4 peran serta / partisipasi masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedisiplinan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;

- b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
- d. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
- e. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
- f. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- g. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- h. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
- i. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
- j. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- k. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- l. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri. Partisipasi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan mutu.

A. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Terhadap Lembaga Pendidikan

Pendidikan selalu berkaitan dengan upaya pembinaan manusia, oleh karena itu keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada sumber daya manusianya yang menjadi penentu akan berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan. Sekolah adalah pihak kedua setelah rumah yang terkait dalam urusan pendidikan, dan tidak kalah pentingnya dari rumah maupun masyarakat. Menurut Quraish Shihab disepakati oleh seluruh ahli pendidikan bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Atas dasar ini, pendidikan itu harus tumbuh dan muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan adalah “pakaian” yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.

Secara yuridis mengenai hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan nasional yang seimbang dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dirumuskan dalam UUD RI1945 dalam Pasal 28 C ayat (1) setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya yang demi kesejahteraan umatnya, pasal 28D ayat (3) itu setiap warga negara berhak mendapatkankesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pendidikan Pembudayaan merupakan Pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pembukaan UUD 1945, jelas tertera bahwa tujuan pendirian negara adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari kutipan tersebut, nampak jelas bahwa pemerintah negara republik Indonesia adalah pemerintah yang menurut deklarasi kemerdekaan harus secara aktif melaksanakan misi tersebut. Di antaranya, dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Privatisasi pendidikan yang selama ini berlaku di negara ini dengan dalih aksi bersama masyarakat itu, sebenarnya adalah pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Pemerintah menyerahkan tanggung jawab itu kepada publik sehingga pendidikan menjadi jasa yang diperjualbelikan. Hanya mereka yang memiliki uang banyaklah yang mendapatkan pendidikan bermutu dan berstandar internasional. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak konstitusi bangsa yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menentukan bahwa :

1. setiap warga negara berhak mendapat pengajaran; dan
2. pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah pusat maupun daerah merupakan perwujudan masyarakat bangsa dan Negara. Pemerintah mengemban kepercayaan masyarakat untuk mengelola keseluruhan segi kehidupan bangsa (dalam bidang pendidikan). Tanggung jawab ini meliputi:

1. Tanggung jawab kenegaraan dan kemasyarakatan yang wujudnya berupa motivasi untuk melestarikan tegaknya kemerdekaan bangsa dan Negara. Tanggungjawab

ini mencakup pembinaan kesadaran nasional, berideologi nasional dan berkonstitusi.

2. Tanggung jawab structural kelembagaan yakni sebagai wujud tata kelembagaan Negara dengan masing-masing aspek tanggungjawabnya. Dapat juga diartikan sebagai tanggungjawab yuridis-konstitusional.

Selanjutnya, pada Pasal 31 UUD 1945 setelah perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dampak dari perubahan rumusan Pasal 31 UUD 1945 tersebut, terdapat beberapa perubahan mendasar yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain menyangkut penggantian istilah pengajaran dengan istilah pendidikan, adanya kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar adanya kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar, dibentuknya satu sistem pendidikan nasional; adanya prioritas anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD dan adanya upaya pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KESIMPULAN

Lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang berguna untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut. lembaga pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan

kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Masyarakat sebagai lingkungan/lembaga pendidikan ketiga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana prasarana dan menyediakan lapangan kerja.

Peranan masyarakat dalam menunjang pendidikan ialah:

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah
2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.
3. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya.
4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah yaitu orang-orang yang punya keahlian khusus di masyarakat, seperti: petani, peternak, dokter, saudagar, polisi, dan sebagainya.
5. Masyarakatlah sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar

Pada dasarnya pembentukan lembaga pendidikan ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi pada peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab.

Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat meliputi:

1. Tanggung jawab kenegaraan dan kemasyarakatan yang wujudnya berupa motivasi untuk melestarikan tegaknya kemerdekaan bangsa dan Negara. Tanggungjawab ini mencakup pembinaan kesadaran nasional, berideologi nasional dan berkonstitusi.
2. Tanggung jawab structural kelembagaan yakni sebagai wujud tata kelembagaan Negara dengan masing-masing aspek tanggungjawabnya. Dapat juga diartikan sebagai tanggungjawab yuridis-konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Saleh, Syarbaini, Toni Nasution, Parida Harahap. 2020. *Pendidikan Luar Sekolah*. K-Media
- Sheillah Chairinnisyah Sirait. 2017. *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak. Peradilan Tata Usaha Negara Medan*. Vol,2 No,1
- Herndi, Alfandi. 2017. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-undang Tahun 1945*. Vol,01 No,02
- Wartoyo, Franciscus Xaverius. 2016. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*. Vol,05 No,01